

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dionisia Nadya Sri Damayanti (2016). Data dari penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif yang dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut dalam statistik (Muddrajad Kuncoro,2013:145). Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa kasus yang berkaitan dengan kecurangan akuntansi. Jenis penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuasi (*quasi experiment*) karena tidak menggunakan sampel (penelitian populatif) dan peneliti menggunakan eksperimen lapangan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara individu pada kondisi terdapat elemen pengendalian internal dan tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam melakukan kecurangan akuntansi. Kemudian terdapat perbedaan antara individu yang memiliki level moralitas individu tinggi dan level moralitas individu rendah dalam melakukan kecurangan akuntansi, dan terdapat interaksi antara pengendalian internal dengan moralitas individu dalam mempengaruhi kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Vani Adelin (2013). Data penelitian adalah data primer, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah survey dengan menggunakan kuesioner yang langsung diantarkan ke alamat responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan perilaku tidak etis signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nilam Sanuari (2014). Data yang digunakan merupakan data primer yang bersumber dari kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden, serta analisis data penelitian ini menggunakan

metode SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas manajemen berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prekanida Frizqa Shintadevi (2015). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *judgment sampling* atau pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan karyawan yang berwenang sebagai pengguna anggaran, penyelenggara akuntansi dan pembuat anggaran akuntabilitas sehingga didapatkan sampel sebanyak 53 karyawan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* dan uji sobel dan *bootstrapping*. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal dengan perilaku tidak etis, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi dengan perilaku tidak etis, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kesesuaian kompensasi dengan perilaku tidak etis, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara keefektifan pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara perilaku tidak etis dengan kecenderungan kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis merupakan variabel *intervening* antara keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Zainal (2013). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek seluruh kantor cabang bank pemerintah dan swasta di kota Padang yang terdiri dari 25 bank dan peneliti menjadikan seluruh objek atau populasi sebagai sampel (*total*

random sampling) karena jumlahnya yang sedikit. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data tersebut diperoleh secara langsung dari responden pada kantor cabang bank pemerintah dan swasta di kota Padang dengan menyebar kuesioner kepada pimpinan, kepala cabang dan staf bagian administrasi pada kantor cabang bank pemerintah dan swasta di kota Padang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Hasil penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogo Noto dan Amanita Novi Yushita (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian ini menggunakan *Analysis of Variance* (ANOVA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dapat diterima dan *treatment* skema kompensasi terhadap *fraud* berpengaruh selain itu variabel motivasi kerja juga memperkuat pengaruh terhadap variabel keduanya antara skema kompensasi terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Thoyibatun (2012). Jenis penelitian ini adalah *survey* tipe *confirmatory research*. Instrumen yang dipakai adalah kuesioner. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan mengakibatkan kinerja organisasi lebih baik ketika dilakukan pengendalian internal, sebaliknya kecenderungan kecurangan akuntansi mengakibatkan kerugian bagi organisasi..

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Ahriati dan Prayitno Basuki dan Erna. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 73 responden. Hasil penelitian ini adalah sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik mengakibatkan tidak adanya kecenderungan kecurangan akuntansi namun lebih disebabkan karena perilaku tidak etis yang dimiliki oleh individu yang bertugas dan bertanggungjawab pada proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rubasundram (2015). Dalam jurnal tersebut menerangkan bahwa mekanisme kontrol dan pemerintahan yang baik meningkat secara signifikan karena jumlah kegagalan industri kalangan atas yang disebabkan tindakan curang oleh *top management*. Kecurangan yang sering atau besar kemungkinan melibatkan *top executive* biasanya disebut dengan *white collar crime*. Pemasangan kontrol internal untuk mencegah tindakan kecurangan dalam organisasi dapat efektif ketika *tone from the top* kuat. Hal itu dikarenakan *top executive* memiliki kemampuan hak akses, memiliki hak dalam pengambilan keputusan, dsb. Hal itu diperkuat dengan kurangnya komitmen dari karyawan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik sehingga segala keputusan pihak atas akan selalu diterima. Penelitian ini lebih fokus pada *white collar crime* yang dilakukan oleh *top executive*.

Penelitian yang dilakukan oleh Othman dkk (2015). Dalam jurnal tersebut mengidentifikasi metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dan korupsi dalam ranah sektor publik di Malaysia dengan menggunakan persepsi akuntansi melalui kuesioner dan data yang digunakan adalah data primer. Teknologi-teknologi atau mekanisme yang digunakan untuk mencegah tindak kecurangan paling efektif diantaranya adalah audit operasional, komite audit yang diperkuat, kontrol internal yang ditingkatkan, implementasi kebijakan pelaporan kecurangan, rotasi staf, *hotline* kecurangan, dan akuntan forensik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dkk, (2015). Dalam jurnal tersebut menjelaskan *white collar crime* sebagai kategori dari pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan kecurangan. Pemalsuan (*falsification*) berdasarkan seksi 4771 *Penal Code* adalah tindakan menghancurkan, mengubah, memutilasi,

atau memalsukan dokumen asli. Dalam konteks akuntansi, pemalsuan berkenaan dengan pemalsuan akuntansi yang mana adalah pemalsuan, penyembunyian, atau pengancuran catatan. Dalam bidang reformasi hukum, standarisasi kerangka hukum harus dilakukan untuk menghindari kebingungan hukum dan kontradiksi. Standar yang diusulkan adalah untuk memperkenalkan ketentuan baru dibawah *Penal Code*. Untuk tujuan penyelidikan, pengaturan unit “*white collar crime*” yang khusus dalam kejahatan keuangan diidentifikasi harus ditetapkan. Ini termasuk dengan memberikan lebih banyak kekuatan melalui hukum baik untuk mengakses dan mengumpulkan bukti-bukti tujuan penuntutan. Dengan demikian, bantuan timbal balik antara berbagai instansi harus efektif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

2.2.1.1 Pengertian kecurangan akuntansi

Menurut surat edaran Bank Indonesia no.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011, *fraud* (kecurangan) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* (kecurangan) memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Kemendikbud:2013) cenderung adalah agak miring, tidak tegak lurus, condong, menaruh minat (keinginan,kasih,dsb) kepada, suka (ingin) akan. Kecenderungan adalah kecondongan (hati), kesudian, keinginan (kesukaan) akan, sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi secara umum dapat diartikan suatu sikap condong, terdorong, memihak, kearah yang melakukan tindakan ilegal yang disengaja untuk memberikan manfaat/kerugian diluar maupun didalam organisasi.

Menurut Tuanakotta (2013:28) definisi *fraud* ialah “*Any illegal act*

characterized by deceit, concealment or violation of trust, these acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service, to avoid payment or loss of services, or to secure personal o business advantage". Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan dan kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukn oleh individu , dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Definisi *fraud* menurut *Institute of Internal Auditor* (Priantara,2013:4), adalah perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuhan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian, atau untuk menjamin keuntungan atau manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* (kecurangan) tindakan penyimpangan, tipu daya, pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memperoleh keuntungan baik langsung atau tidak langsung dan merugikan pihak lain.

2.2.1.2 Faktor-faktor kecurangan akuntansi

Dalam buku mendeteksi manipulasi laporan keuangan (Tuanakotta, 2014:41) terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan *fraud*, sebagai berikut

1. *Fraud tree* yaitu peta kecurangan atau menunjukkan klasifikasi/taksonomi kecurangan yang diterbitkan ACFE (*Associaton of Certified Fraud Examiner*).
2. *Fraud triangel* yaitu segitiga kecurangan yang merujuk kepada penelitian Donald Cressy mengenai mengapa kecurangan terjadi, yang dikembangkan antara lain, dalam ISA (*Interntional Standards on Auditing*) sebagai *fraud*

risk factors.

3. *Fraud axioms* yaitu proposisi dasar ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) mengenai kecurangan yang perlu diperhatikan akuntan forensik sebagai investigator.
4. *Fraud predictions* yaitu rekaan mengenai apa yang terjadi, siapa pelaku, bagaimana dilakukan (modus operasi), mengapa, kapan, dimana, berapa besar?
5. *Red flags* yaitu tanda bahaya yang menjadi petunjuk tentang potensi terjadinya *fraud*.

Dalam hal ini konsep yang akan dipakai adalah konsep *fraud triangel* dimana dalam konsep tersebut ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yakni sebagai berikut :

1) *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan, misalnya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar.

3) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit saja atau meminjam harta perusahaan dan tidak merugikan perusahaan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna dalam Karyono (2013) dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 1999 terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau lebih dikenal dengan teori *GONE* sebagai berikut :

- 1) *Greed* (Keserakahan), Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku

serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas, jadi kecurangan timbul karena keserakahan dalam diri seseorang.

- 2) *Opportunity* (Kesempatan), Setiap orang di dalam perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan, kecurangan pada umumnya didorong oleh kesempatan tanpa adanya kesempatan kecurangan tidak akan terjadi.
- 3) *Need* (Kebutuhan), Setiap orang mempunyai kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi sekalipun melakukan kecurangan.
- 4) *Exposure* (Pengungkapan) Karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan mendorong seseorang melakukan kecurangan yang sama.

2.2.1.3 Jenis-jenis kecurangan akuntansi

Jenis- jenis kecurangan menurut Zimbelman at al (2014:13-16) sebagai berikut :

1. Kecurangan pegawai

Kecurangan pegawai dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kecurangan secara langsung terjadi ketika pegawai mencuri kas perusahaan, persediaan, peralatan, perlengkapan atau aset lainnya. Kecurangan ini bisa juga terjadi ketika perusahaan membayar kepada perusahaan fiktif seolah-olah melakukan transaksi tetapi kenyataan perusahaan tidak menerima barang atas transaksi tersebut. kecurangan tidak langsung terjadi ketika pegawai menerima suap atau *kickback* dari pemasok, pelanggan atau pihak luar perusahaan untuk memungkinkan memberikan harga jual yang lebih rendah, harga beli yang tinggi, barang-barang yang tidak pernah sampai tujuan atau barang-barang dengan kualitas yang rendah.

2. Kecurangan pemasok

Kecurangan pemasok selalu berakibat pada harga-harga barang yang dibeli

terlalu mahal atau pengiriman barang-barang dengan kualitas rendah atau tidak adanya pengiriman terhadap barang/jasa walaupun pembayaran sudah dilakukan.

3. Kecurangan pelanggan

Kecurangan pelanggan terjadi ketika pelanggan tidak membayar barang yang mereka beli atau mereka mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan.

4. Kecurangan manajemen

Kecurangan manajemen sering disebut dengan kecurangan laporan keuangan, kecurangan ini melibatkan manipulasi yang bersifat menipu dalam laporan keuangan oleh manajemen puncak.

5. Penipuan investasi dan kecurangan pelanggan lainnya.

Menurut Tuanakotta (2007) dalam buku survai *fraud* (2016) *Association Of Certified Fraud Examinations (ACFE)* adalah salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengategorikan kecurangan sebagai berikut:

1. Korupsi (*corruption*), Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut *ACFE*, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan KPK di Indonesia. Menurut *ACFE*, korupsi terbagi ke dalam:

a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian dan rencana lainnya.

b) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.

c) Pemberian ilegal (*illegal gratuit*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi tidak mempengaruhi keputusan bisnis. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah atas pengaruh yang dia berikan dalam kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.

d) Pemerasan (*extortion*). Penjual menawarkan untuk memberi hadiah/suap

pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), Penyalahgunaan aset adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:
 - a) Kecurangan kas (*cash fraud*), yang termasuk kecurangan kas adalah pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
 - b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) kecurangan berupa pencurian dan pemakaian untuk kepentingan pribadi terhadap persediaan atau aset lainnya.
3. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial. Kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:
 - a) *Timing* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda/lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya.
 - b) *Fictitious revenues* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
 - c) *Concealed liabilities and expenses* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan perusahaan terlihat bagus.
 - d) *Improper disclosure* yaitu perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan sehingga pembaca

laporan keuangan tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan

- e) *Improper asset valuation* yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang wajar/tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

Menurut Andrian Budi Prasetyo (2011) bahwa pelaku *fraud* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan *fraud* biasanya untuk kepentingan perusahaan. Pihak karyawan/ pegawai melakukan *fraud* bertujuan untuk kepentingan individu. Apabila dikaitkan dengan model segitiga kecurangan, fakta ini relevan dengan teori terjadinya *fraud* antara lain harus ada kesempatan dan kesempatan umumnya lebih dipahami oleh orang dalam termasuk manajer, karyawan, dan pihak-pihak lainnya.

2.2.2 Pengendalian Internal

2.2.2.1 Pengertian pengendalian internal

Teori atribusi (Green serta Mitchell, 1979) dalam Glifandi (2011), menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh atribut penyebab. Maka tindakan seorang pemimpin atau orang yang diberi kewenangan atau kekuasaan dipengaruhi oleh atribut penyebab. Tindakan kecurangan dapat dipengaruhi adanya sistem pengendalian internal dan *monitoring* oleh atasan.

Pengungkapan Menurut PP No. 8 Tahun 2006 dalam Adelin (2013) Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan. Keefektifan pengendalian internal dapat diartikan bahwa tujuan perusahaan telah berjalan sesuai perencanaan dengan pengendalian dan pengawasan, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan kecurangan tidak akan terjadi.

Menurut Sawyers (2005:59) dalam Nilam Sanuari (2014), pengendalian internal adalah setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kalau pengendalian internal dirancang dan dilaksanakan dengan baik serta jika pegawai melakukan tugasnya dengan baik, maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi diri dari *fraud* (Tuannakotta 2010:284)

2.2.2.2 Tujuan pengendalian internal

Menurut Tiro (2014), terdapat dua tujuan pengendalian internal yaitu:

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

Pengendalian internal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah yang terbentuk dalam kategori (1) keandalan laporan keuangan, (efektivitas dan efisiensi dari operasional, dan (2) ketaatan pada hukum dan peraturan.

2.2.2.3 Komponen pengendalian internal

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam Tunggal (2010:232), pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) ,menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur lingkungan pengendalian mencakup : (1) Integritas dan nilai etika, (2) Komitmen terhadap kompetensi, (3) Partisipasi

- dewan komisaris atau komite audit, (4) Filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) Struktur organisasi, (6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab (7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penaksiran risiko (*risk Assesment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut: (1) perubahan dalam lingkungan organisasi, (2) Personel baru, (3) Sistem informasi yang baru atau diperbaiki, (4) Teknologi baru, (5) Lini produk, produk atau aktivitas baru, (6) Operasi Luar Negeri, (7) Standar akuntansi baru.
 3. Standar pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan (1) Penelaahan terhadap kinerja, (2) Pengolahan informasi, (3) Pengendalian fisik, (4) Pemisahan tugas.
 4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan atau pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.
 5. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.2.2.4 Fungsi pengendalian internal

Fungsi dari sistem pengendalian internal adalah :

1. *Preventif*, yaitu pengendalian untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik itu berupa kekeliruan ataupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam operasi suatu kegiatan.

2. *Detective*, yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.
3. *Corective*, yaitu untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan, dan penyimpangan yang terdeteksi.
4. *Directive*, yaitu untuk mengarahkan agar pelaksanaan dilakukan dengan tepat dan benar.
5. *Compensative*, yaitu untuk menetralisasi kelemahan pada aspek kontrol yang lain.

2.2.3 Persepsi Kesesuaian Kompensasi

2.2.3.1 Pengertian kompensasi

Teori agensi adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Jensen and Meckling (1976) dalam penelitian Thoyibatun (2012) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan antara prinsipal dan agen dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen. Dengan kompensasi yang sesuai maka besar kemungkinan perilaku kecurangan akuntansi akan berkurang.

Beberapa para ahli juga mengungkapkan pendapat mengenai pengertian kompensasi, yaitu sebagai berikut :

Menurut Mutiara Pangabean dan Subekhi (2012:176) kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.

Menurut Garry Dessler dalam Subekhi (2012:175) kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari pekerjaannya karyawan itu.

Menurut Ardiana Peni (2012:153) Kompensasi adalah segala sesuatu yang

diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi.

Menurut Hasibuan (2013:117) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan.

Menurut Sastrohadiwiryo dalam buku Yuniarsih (2011:125) kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena para tenaga tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan kesesuaian kompensasi adalah nilai yang diterima oleh pegawai atau karyawan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya kepada organisasi dengan melihat hasil dari penghitungan kinerja pegawai atau karyawan tersebut. Bisa juga diartikan sebagai hak yang harus diterima oleh pegawai atau karyawan atas kewajiban yang telah dikerjakannya berdasarkan nilai standar yang telah ditetapkan.

2.2.3.2 Tujuan kompensasi

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2013:121) ada beberapa tujuan kompensasi yaitu sebagai berikut :

1. Ikatan kerja Sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Kepuasan kerja, dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
3. Pengadaan efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.
4. Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya.

5. Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena *turnover* relatif kecil.
6. Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik, mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Pengaruh serikat buruh, dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
8. Pengaruh pemerintah, jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2.2.3.3 Sistem kompensasi

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem.

Menurut Hasibuan (2011:124), sistem pemberian kompensasi yang umum diterapkan antara lain :

1. Sistem waktu, dalam sistem waktu besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Administrasi pengusaha sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan pada karyawan tetap maupun pekerja harian. Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Sedangkan kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayarkan sebesar perjanjian.
2. Sistem hasil (*output*), dalam sistem hasil (*output*) besarnya kompensasi yang dibayarkan selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan dan administrasi. Kebaikan

sistem hasil memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar, borongan cukup rumit lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan pekerjaan bisa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.

2.2.3.4 Faktor-faktor kompensasi

Menurut Hasibuan (2013:128), faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi antara lain :

1. penawaran dan permintaan
2. kemampuan dan kesediaan perusahaan
3. serikat buruh dan organisasi karyawan
4. produktivitas kerja karyawan
5. pemerintah dengan UU dan kepres
6. biaya hidup atau *cost of living*
7. posisi jabatan karyawan
8. pendidikan dan pengalaman kerja
9. kondisi perekonomian nasional

2.2.4 Ketaatan pada Aturan Akuntansi

2.2.4.1 Pengertian ketaatan aturan akuntansi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan atau perintah yang berlaku, sedangkan aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) atau tindakan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Wajib bagi suatu organisasi untuk memiliki dasar atau pedoman yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan dan salah satunya aturan mengenai kegiatan akuntansi. Rahmawati dan Idjang (2012) menyatakan bahwa aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus

digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan (Thoyibatun (2012)). Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan pada akuntansi adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan, dipatuhi dan digunakan sebagai dasar dalam penyajian dan pembuatan laporan keuangan. Jadi untuk menjaga keandalan informasi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi suatu organisasi wajib untuk memiliki dasar atau pedoman yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan dan

melaksanakan semua kegiatan perusahaan terutama kegiatan akuntansi.

Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi. Maraknya kecurangan akuntansi di Indonesia dikarenakan ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Fenomena ini terlihat pada kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan terdapat sebanyak 3.452 kasus senilai Rp. 9,24 triliun yang berdampak finansial yang merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian Negara dan kekurangan penerimaan (BPK,2014)

2.2.4.2 Prinsip etika profesi akuntansi

Penerapan prinsip etika pofesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

1) Tanggung jawab penerapan

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3) Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4) Obyektivitas

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

5) Kehati-hatian profesional

Mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7) Konsistensi

Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak di ubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

8) Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang

harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan antara efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Penerapan pengendalian internal yang efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk *overstated* dan ketidakwajaran yang merugikan pihak yang berkepentingan seperti penerapan sistem pengendalian internal yang mampu menerapkan lima elemen penting yang lingkungan pengendalian internal tersebut mampu mengurangi hal-hal yang mengandung unsur kecurangan. Pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dapat dilakukan oleh manajemen.

Dengan berdasarkan penelitian Thoyibatun (2012), Rizki Rahmaidha (2016), Nani (2010), Friskila (2010) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan sistem pengendalian internal yang baik, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai.

H₁ : Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

2.3.2. Hubungan antara sistem kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Menurut Thoyibatun (2012) dalam penelitiannya sehubungan dengan hal tersebut bahwa organisasi perlu mendesain sistem kompensasi yang mempertimbangkan tujuan karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya pada organisasi. Organisasi memberikan kompensasi yang sesuai untuk menghindari adanya keinginan untuk menambah penghasilan lain. Dengan demikian

kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi dapat dikurangi.

Dalam entitas pemerintahan kompensasi seseorang telah ditentukan berdasarkan lama kerja dan golongan. Adapun mereka yang bekerja di bidang keuangan akan mendapatkan tambahan imbalan yang merupakan penghargaan atas tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban. Namun semakin tinggi imbalan yang mereka peroleh, kebutuhan, tuntutan dan gaya hidup seseorang akan semakin tinggi. Dengan demikian individu tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan imbalan yang lebih dan lebih untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan gaya hidup yang dijalankan sehingga kecenderungan bagi mereka yang bekerja dibidang keuangan sangat memungkinkan melakukan kecurangan akuntansi.

H₂ : Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.3.3. Hubungan antara ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Menurut Thoyibatun (2012) dalam Prekanida farizqa shintadewi (2015) menjelaskan bahwa ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan BPK ataupun SAP.

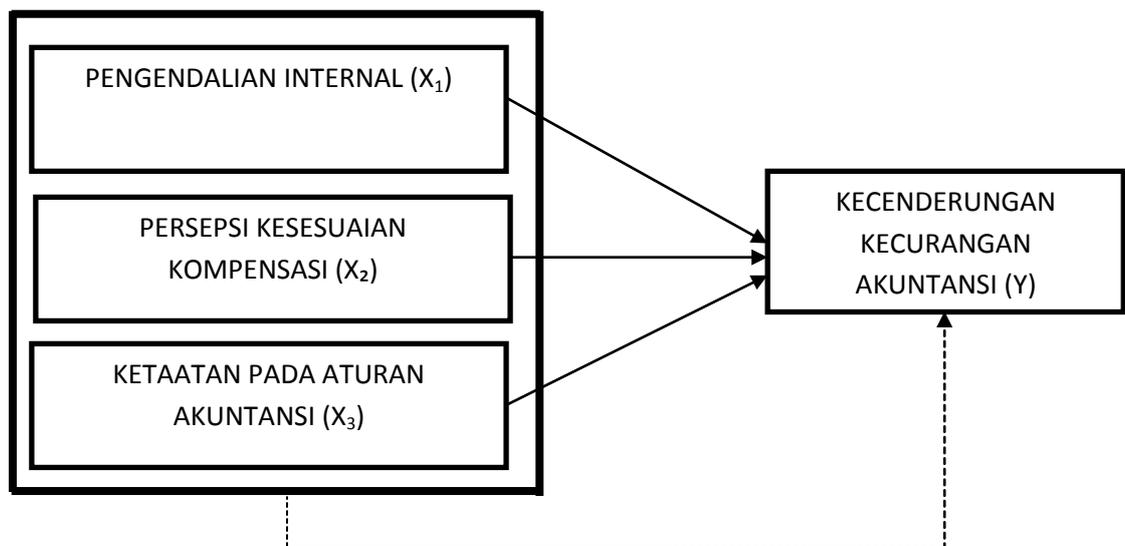
Menurut penelitian Rahmawati dan Idjang (2012) bahwa aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Idjang (2012), Thoyibatun (2012) dalam Prekanida farizqa shintadewi (2015),

Thoyibatun (2012), menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H₃ : Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi apabila pelaku kecurangan memperoleh kesempatan untuk berbuat curang. Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan suatu keadaan dimana seseorang terdorong, condong, dan kearah atau untuk melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini terjadi pada saat ketidaksesuaian antara tujuan perusahaan dan tujuan pemilik/pemimpin, serta penyajian yang keliru didalam laporan keuangan maupun kecurangan terhadap aset perusahaan, seperti pengelapan dan pencurian aset. Kecurangan dapat terjadi dipengaruhi oleh pengendalian internal, sistem kesesuaian kompensasi dan ketaatan pada aturan akuntansi.